

ABSTRAK

Kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Blitar adalah kasus dana bantuan sosial. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan mengetahui proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian yaitu implementasi Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam kasus dana bantuan atau hibah berupa uang dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 di Kabupaten Blitar dengan tiga tersangka SW, CF dan NJ disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Proses Penyidikan Korupsi di Kejaksaan Negeri Blitar memiliki pola kerja seksi Tindak Pidana Khusus, yaitu menyusun rencana penyidikan, pemanggilan saksi, ahli dan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan, pemberkasan serta pengambilan keputusan terhadap hasil penyidikan.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan, Kejaksaan.

Abstract

The corruption case that is being handled by the Blitar State Prosecutor's Office is a case of social assistance funds. The purpose of the research is to find out the implementation of Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001, and to find out the process of investigating corruption cases carried out by the Blitar State Prosecutor's Office. The method used in this study is empirical juridical. The results of the study are the implementation of Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 against corruption crimes committed in the case of aid funds or grants in the form of money from the East Java Provincial Livestock Office in 2016 in Blitar Regency with three suspects SW, CF and NJ suspected of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No. 31 of 1999. The Corruption Investigation Process at the Blitar State Prosecutor's Office with the working pattern of the Special Crime section, namely preparing investigation plans, summoning witnesses, experts and suspects, searches, seizures, arrests and detentions, enforcement and decision making on the results of the investigation.

Keywords : *Corruption, Investigation, Prosecutor*